LAPORAN KINERJA

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

TKPK Kota Banda Aceh

2016

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kota Banda Aceh

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh
E-mail : tkpkd.bandaacehkota@gmail.com; Website : http://bappeda.bandaacehkota.go.id

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh Tahun 2016 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja TKPK Kota Banda Aceh dibuat sesuai dengan aturan dalam Bab Hubungan Kerja dan Tata Kerja, Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010. Laporan Kinerja TKPK merupakan laporan yang disusun pada semester 1 dalam rangka pelaksanaan koordinasi antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana peran dan fungsi TKPK dalam mengatasi tingkat kemiskinan, perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama TKPK.

Demikian laporan Kinerja TKPK Kota Banda Aceh Tahun 2016 ini disusun dengan harapan dapat menjadi bahan acuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) dan stakeholders Kota Banda Aceh dalam menjalankan kapasitasnya sebagai lembaga yang fokus pada penanggulangan kemiskinan.

Banda Aceh, Juli 2016

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Banda Aceh

Iskandar, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/19680913 1991031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

DAFTAR ISI 1

DAFTAR TABEL 2

DAFTAR GRAFIK 3

BAB. I. PENDAHULUAN 4

1. 1. Latar Belakang 4
1. 2. Landasan Hukum 7
1. 3. Sistematika Penyusunan 8

BAB. II. KONDISI KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH 9

2.1. Kondisi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan 10
2.1.1. Kemiskinan 10
2.1.2. Pengangguran 11
2.2. Bidang Kesehatan 13
2.2.1. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) 14
2.2.2. Angka Kematian Bayi (AKB) 15
2.2.3. Angka Kematian Balita (AKBA) 16
2.2.4. Proporsi Kelahiran yang ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih..... 17
2.2.5. Jumlah Balita Kurang Gizi (BBLR) 18
2.3. Bidang Pendidikan..... 19
2.4 Bidang Prasarana Dasar 24
2.4.1. Akses Air Minum Layak 24
2.4.2. Akses Sanitasi Layak 25
2.4.3. Akses Listrik 25
2.5 Bidang Ketahanan Pangan 27
2.6 Survey dan Analisa Data Kemiskinan Tahun 2015..... 29

BAB. III. RAD PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 33

BAB. IV. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN 48

BAB. V. PENUTUP..... 49

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Indikator Fakir dan Miskin Kota Banda Aceh	9
Tabel. 2.2.	Indikator Kemiskinan Bidang Kesehatan Tahun 2015	14
Tabel. 2.3.	Fasilitas Kota Banda Aceh.....	20
Tabel. 2.4.	Indikator Dimensi Prasarana Dasar di Kota Banda Aceh (persen), 2014.....	24
Tabel. 2.5.	Capaian Indikator Ketahanan Pangan Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015.....	28
Tabel. 2.6.	Data Agregat BDT RTS.....	30
Tabel. 2.7.	Penduduk Berdasarkan Pendidikan dengan Kondisi Tingkat Kesejahteraan dari 10%-40% Terendah	32
Tabel. 3.1.	Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2016.....	36
Tabel. 3.2.	Sumber Dana Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh per Klaster Tahun 2016	47

DAFTAR GRAFIK

Grafik. 2.1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2013 10
Grafik. 2.2. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 11
Grafik. 2.3. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Provinsi Aceh 2014 12
Grafik. 2.4. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten di Provinsi Aceh 2014 13
Grafik. 2.5. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh, 2011-2015 14
Grafik. 2.6. Angka Kematian Bayi di Kota Banda Aceh, 2011-2015..... 15
Grafik. 2.7. Jumlah Kematian Bayi di Kota Banda Aceh menurut Kecamatan, 2015..... 16
Grafik. 2.8. Jumlah Kematian Balita di Kota Banda Aceh menurut Kecamatan, 2015..... 17
Grafik. 2.9. Perkembangan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan..... 18
Grafik. 2.10. Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kota Banda Aceh, ... 18
Grafik. 2.11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh 2011-2014* 19
Grafik. 2.12. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten di Provinsi Aceh 2014 21
Grafik. 2.13. Posisi Relatif Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kabupaten di Provinsi Aceh 2014 21
Grafik. 2.14. Posisi Relatif Jarak Sekolah Menengah atas SMA/MA (km) Kabupaten di Provinsi Aceh..... 22
Grafik. 2.15. Capaian Indikator melalui Kegiatan Pendidikan Diniyah 23
Grafik. 2.16. Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum 24
Grafik. 2.17. Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Tempat Buang Air Besar 25
Grafik. 2.18. Cakupan Kelistrikan PT.PLN untuk Rumah Tangga 26
Grafik. 2.19. Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten di Provinsi Aceh 2014 26
Grafik. 2.20. Posisi Relatif Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Kabupaten di Provinsi Aceh 2014 27
Grafik. 2.21. Jumlah rumah tangga menurut lapangan pekerjaan dengan Kondisi Tingkat Kesejahteraan Terendah 31
Grafik. 3.1. Persentase Sumber Dana Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh 47

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam satu dekade di era reformasi ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik dari perbaikan kebijakan, penciptaan program penanggulangan kemiskinan, maupun melakukan sinergi dengan multipihak dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah perseorangan, tapi merupakan permasalahan semua pihak. Karena kemiskinan berdampak sistemik, menyangkut segala sisi kehidupan, sehingga jika tidak segera diatasi, maka permasalahan kemiskinan tersebut akan merambah ke permasalahan lain seperti meningkatnya angka pengangguran dan tingkat kriminalitas, menurunnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan serta dampak sosial lainnya. Lebih lanjut, kompleksitas dari kemiskinan bukan saja berhubungan dengan pengertian dan dimensinya saja, tetapi juga berkaitan dengan metode pengukuran dan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam mengentaskan masalah ini. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu segera diatasi dengan menyusun langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

Masalah kemiskinan telah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh seperti yang tercantum dalam misi ke-3 yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dengan tujuan "***Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"***. Berikut ini adalah Visi dan Misi Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017

Visi

BANDA ACEH MODEL KOTA MADANI

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pengamalan Agama Menuju Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah
2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
3. ***Memperkuat Ekonomi Kerakyatan***
4. Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat dan Sejahtera, Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya
5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami
6. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak
7. Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota.

Berikut ini adalah target untuk menekan angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJM Propinsi Aceh dan RPJM Kota Banda Aceh

Target RPJM Nasional pada Tahun 2016

- Angka Kemiskinan : 9,0-10,0%
- Angka Pengangguran : 5,2–5,5%

Target RPJM Provinsi Aceh pada Tahun 2016

- Angka Kemiskinan : 11,50%

Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 2016

- Angka Kemiskinan : 7,60%

Target untuk menekan angka kemiskinan kota Banda Aceh lebih baik jika dibandingkan dengan target provinsi Aceh dan target nasional.

Pada Tahun 2013, garis kemiskinan Kota Banda Aceh berada pada kisaran Rp. 493.558,- dan persentase penduduk miskin mencapai 8,03 persen. Berarti ada sekitar 20.018 jiwa penduduk Kota Banda Aceh yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 493.558,- perbulan atau setara Rp 16.451,- perhari. Menurut data Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2014, pendapatan perkapita rata-rata penduduk Kota Banda Aceh sebesar

Rp. 47.262.561,- atau Rp. 123.487,- setiap hari, maka terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antara pendapatan masyarakat miskin Kota Banda Aceh dengan pendapatan rata-rata penduduk Kota Banda Aceh yakni sebesar 800 persen.

Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh Tahun 2016 ini merupakan laporan yang disusun pada semester 1 dalam rangka pelaksanaan koordinasi antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh tahun 2016.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja TKPK adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi antara TNP2K dengan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Mempertegas komitmen semua pihak terutama Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menanggulangi masalah kemiskinan,
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kota Banda Aceh untuk memahami arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu satu tahun,
4. Sebagai panduan umum dan operasional pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dan
5. Sebagai kerangka acuan demi mewujudkan komitmen keterpaduan program, peran serta pemerintah, swasta, masyarakat maupun berbagai pihak dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan berkelanjutan.

Manfaat Laporan Kinerja TKPK adalah:

1. Sebagai acuan resmi masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan keberdayaan, keswadayaan dan kemandirian;
2. Sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam berpartisipasi menyumbangkan sumber daya yang dimiliki, sehingga tercipta pola pikir yang efektif dan harmonis;
3. Sebagai dasar kegiatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah dan digunakan sebagai arahan kegiatan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) serta

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar waktu, antar satuan kerja perangkat daerah, antar kegiatan dan antar pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja TKPK Kota Banda Aceh Tahun 2016 ini didasarkan pada dasar hukum dan acuan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
   Aturan perundangan Keuangan Negara menjadi dasar bagi analisis penganggaran percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan, tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
7. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat.
8. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian.
10. Peraturan Walikota Banda Aceh No.37 Tahun 2012 tentang RPJM Kota Banda Aceh 2012-2017.
11. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 146 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh.

1.3. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja TKPK Kota Banda Aceh Tahun 2016 ini adalah :

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Sistematika Penulisan

Bab II KONDISI KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH

2.1. Kondisi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

2.2. Bidang Kesehatan

2.3. Bidang Pendidikan

2.4. Bidang Prasarana Dasar

2.5. Bidang Ketahanan Pangan

2.6. Survey dan Analisa Data Kemiskinan Tahun 2013

Bab III RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2016

Tabel dan analisa

Bab IV KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Bab V PENUTUP

BAB II. KONDISI KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh, yang didirikan lebih dari delapan ratus tahun yang lalu. Kota Banda Aceh adalah Kota Islami tertua di Asia Tenggara, terletak antara 05^0 16' 15" – 05^0 36' 16" LU dan 95^0 16' 15" – 95^0 22' 35" BT, kota pantai dengan luas 61.3 km^2, keadaan iklim tropis dengan temperatur yang berfluktuasi antara 22^0C hingga 32^0C. Rata-rata ketinggian daerah dari permukaan laut adalah 0.80 meter.

Secara administratif, Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 90 gampong, dan 17 mukim dengan jumlah penduduk 250.303 orang pada Tahun 2015. Kota Banda Aceh berperan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat pembelajaran Islam, pusat kebudayaan, pusat kesehatan, dan daerah tujuan wisata

Kota Banda Aceh belum lepas dari kemiskinan, untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih efektif, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan indikator kemiskinan yang merupakan penyesuaian antara indikator nasional dan lokal, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Fakir dan Miskin Kota Banda Aceh

NO	INDIKATOR	KLASIFIKASI	
		FAKIR	MISKIN
1	2	3	4
1	Pendapatan Rumah Tangga per bulan	Kurang dari Rp 450.000	Rp 450.000 – Rp 900.000
2	Luas lantai tempat tinggal	0 - 4 m2 / orang	5 - 7 m2 / orang
3	Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga	Tidak ada	Serabutan/tidak tetap
4	Sumber air minum	Sumur	Sumur
5	Frekuensi makan daging sapi/ayam dalam seminggu	Tidak pernah	Satu kali
6	Kemampuan membeli pakaian baru selama 6 (enam) bulan	Tidak pernah	Satu kali
7	Kemampuan berobat	Puskesmas	RSU
8	Memiliki tabungan dalam bentuk uang atau barang	Aset < Rp 500.000	Aset ≤ Rp 1.000.000
9	Jenis lantai bangunan	Semen kasar	Semen halus
10	Jenis dinding bangunan	Kayu kualitas rendah	Tembok kualitas rendah

11	Sumber penerangan utama	Petromak/pelita	PLN (4 A)
12	Kondisi kesehatan balita	Kurang gizi	Kurang gizi
13	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga	Tamat SD/MI	Tamat SMP/MTs
14	Kemampuan menyekolahkan anak (usia 7-15 tahun)	Hanya sampai SD	Hanya sampai SLTA

2.1. Kondisi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

2.1.1 Kemiskinan

Menurut Statistik Banda Aceh 2015, jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh tahun 2013 adalah sekitar 19.420 jiwa, atau 8,03 persen dari total penduduk kota sebesar 249.282 jiwa. Perkembangan Persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 2. 1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2013

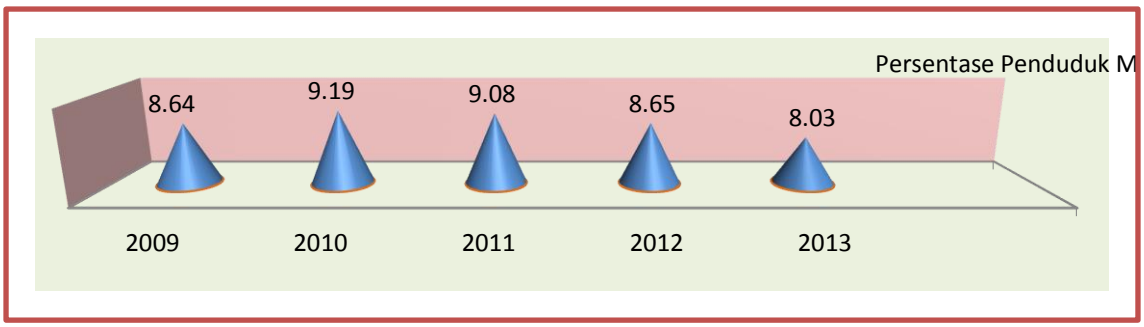

Sumber :Statistik Banda Aceh Tahun 2015

Angka persentase kemiskinan kota Banda Aceh tahun 2009 adalah 8,64% dan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 9,19%. Mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara berturut-turut angka kemiskinan mengalami penurunan, dari 9,08% pada tahun 2011 menjadi menjadi 8,65% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 8,03%.

2.1.2. Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai negara di dunia, tingginya angka pengangguran akan berakibat pada lambannya jalan perekonomian. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus dapat diatasi dengan baik. Pengangguran yang terlalu besar membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya. Perkembangan TPT di kota Banda Aceh dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 2
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Kota Banda Aceh periode 2009-2014

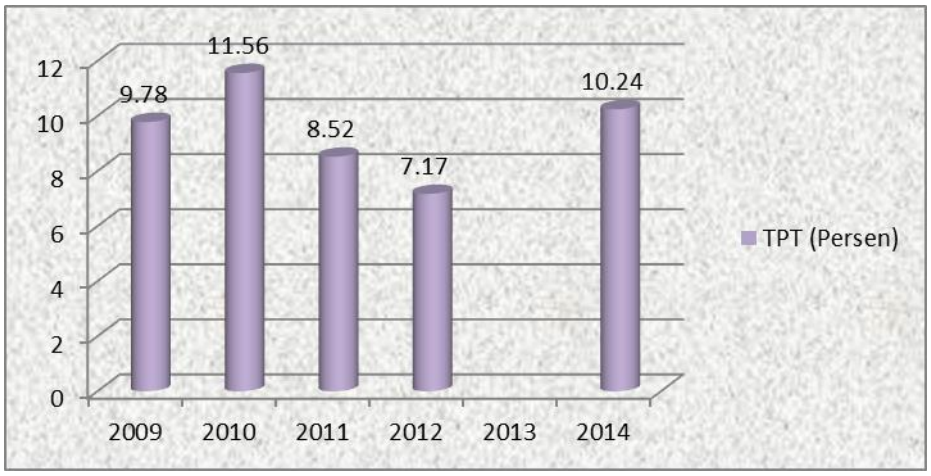

Keterangan : Data tahun 2013 tidak dipublikasikan
Sumber : Badan Pusat Statitik Kota Banda Aceh

Dari grafik yang direlease BPS tersebut diatas, Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Aceh, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2009 mencapai 9,78 persen. Pada tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan menjadi 11,56 persen. Tingkat pengangguran ini terus berfluktuatif dari tahun 2009 sampai 2014. Dalam enam tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 TPT kota Banda Aceh mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu mencapai 10,24 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 112.067 orang. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh, kondisi pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun

2014 berada diatas persentase pengangguran Provinsi Aceh yang rata-rata 9,02 persen dan tingkat pengangguran rata-rata nasional sebesar 5,94 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2014 dapat kita lihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2. 3
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2014

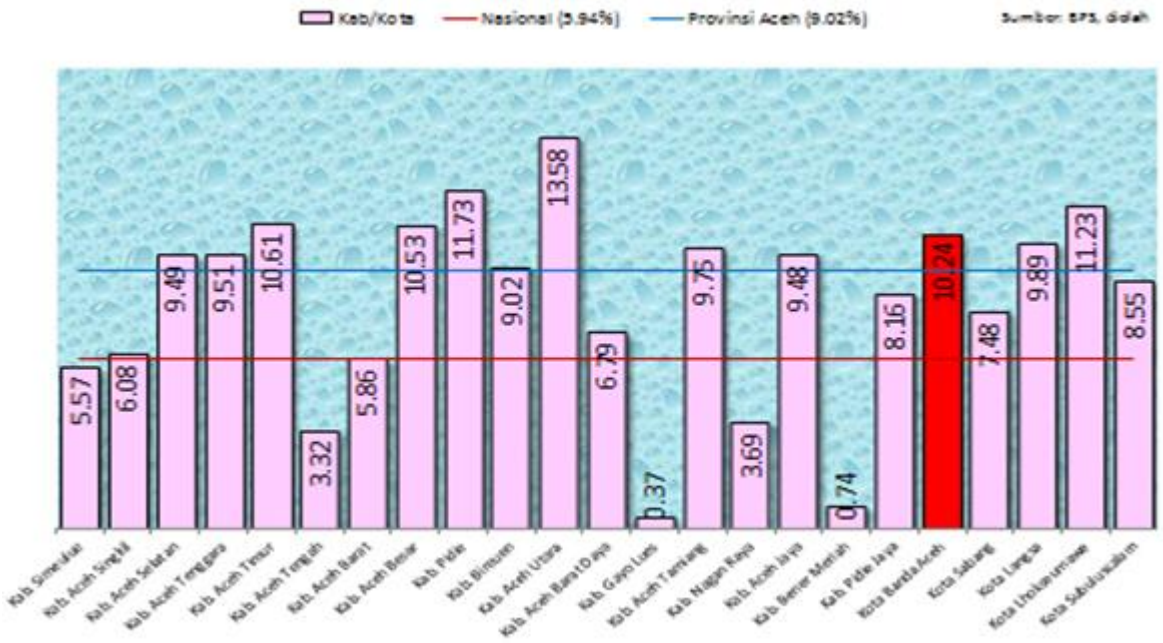

Sumber : Badan Pusat Statitik Kota Banda Aceh

Grafik diatas menunjukkan bahwa TPT Kota Banda Aceh (10,24%) merupakan salah satu kabupaten/kota yang TPT-nya masih diatas rata-rata TPT Nasional (5,94%) dan Provinsi Aceh sebesar 9,02 persen, dan kabupaten/kota yang mempunyai TPT tertinggi di Provinsi Aceh adalah di Kabupaten Aceh Utara yang angka penganggurannya mencapai 13,58 persen. Sayangnya, peningkatan jumlah angkatan kerja atau pengangguran tersebut yang terus meningkat tidak dibarengi oleh perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguran pun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Masih tingginya angka pengangguran di Kota Banda Aceh ini tentu banyak faktor penyebabnya. Selain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di kota Banda Aceh disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti arus urbanisasi dari daerah/kabupaten lain ke Kota Banda Aceh untuk mencari

pekerjaan, skill yang masih kurang dari pencari kerja sesuai standart dunia kerja dan masih kurang minatnya pencari kerja untuk berwirausaha secara mandiri.

Dilihat dari posisi relative Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kota Banda Aceh sebesar 59,58 % pada tahun 2014 berada di bawah rata-rata Nasional (66,6%) dan Provinsi Aceh (63,06%), ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja kota Banda Aceh yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu tidak sebanyak rata-rata Nasional dan Provinsi Aceh.

Grafik 2. 4
Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten di Provinsi Aceh 2014

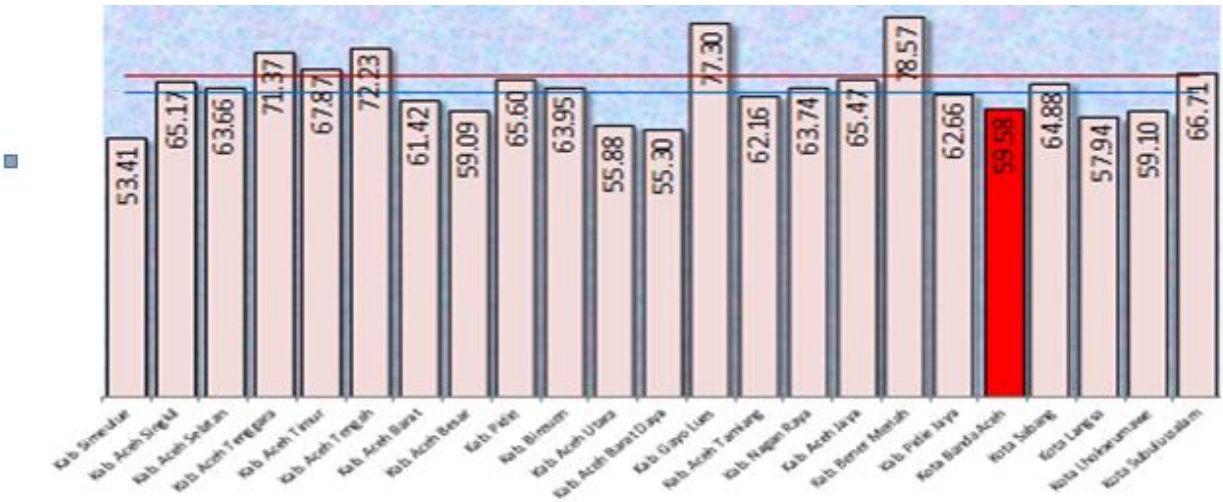

2.2. Bidang Kesehatan

Masalah kesehatan juga dipengaruhi oleh Tingkat Pendidikan oleh karenanya proses terbentuknya pola hidup sehat harus didukung dengan pengetahuan yang baik. Kesehatan yang lebih baik dapat membantu anak-anak untuk belajar lebih baik dan orang dewasa untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik, kesetaraan gender yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik (contoh: KB untuk laki-laki dan perempuan), serta penurunan kemiskinan, kelaparan, dan kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi tapi juga bergantung pada taraf kesehatan yang lebih baik.

Tabel 2. 2
Indikator Kemiskinan Bidang Kesehatan Tahun 2015

No	Indikator	Capaian daerah (2015)
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Jiwa)	114
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Jiwa)	3
3	Angka Kematian Balita (AKBA)	3
4	Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)	96.90
5	Jumlah Balita Kurang Gizi (BBLR)	24

2.2.1. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan adalah pada tingkat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh pada Tahun 2015 adalah 114 per 100.000 kelahiran hidup, terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar 92 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan Tahun 2013 sebesar 119 per 100.000 kelahiran hidup, Tahun 2012 sebesar 20 per 100.000 kelahiran hidup dan Tahun 2011 sebesar 104 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kota Banda Tahun selama periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 5
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh, 2011-2015

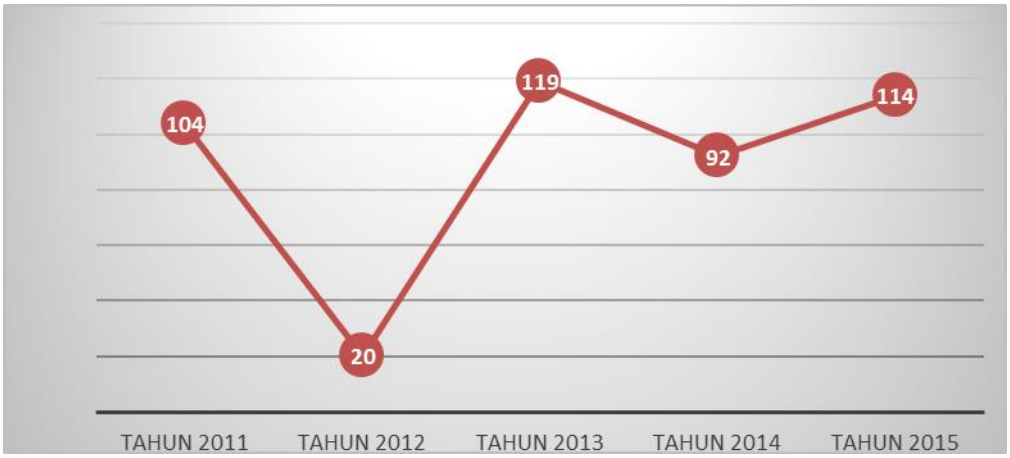

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2015

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh terdapat 4 kasus kematian ibu melahirkan, yaitu pada kelompok umur 20-34 tahun (2 di Kecamatan Lueng Bata disebabkan oleh rekontruksi uterus + adhesiolosi dan pre eklamsia dan 1 di Kecamatan Kuta Alam disebabkan oleh Sudden Death, 1 di Kecamatan Baiturrahman disebabkan oleh TB Paru) dan 1 kasus kematian ibu melahirkan pada kelompok umur ≥ 35 tahun di Kecamatan Jaya Baru disebabkan oleh Febris.

2.2.2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKB menunjukkan pada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi di Kota Banda Aceh Tahun 2015 berjumlah 17 kematian dari 5.257 kelahiran hidup, setelah dikonversikan Angka Kematian Bayi menjadi 3 per 1000 kelahiran hidup terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2014 sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup dan Tahun 2013 sebesar 6 per 1000 kelahiran hidup sedangkan Tahun 2012 sebesar 2 per 1000 kelahiran hidup dan untuk Tahun 2011 sebesar 2 per 1000 kelahiran hidup.Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 6
Angka Kematian Bayi di Kota Banda Aceh, 2011-2015

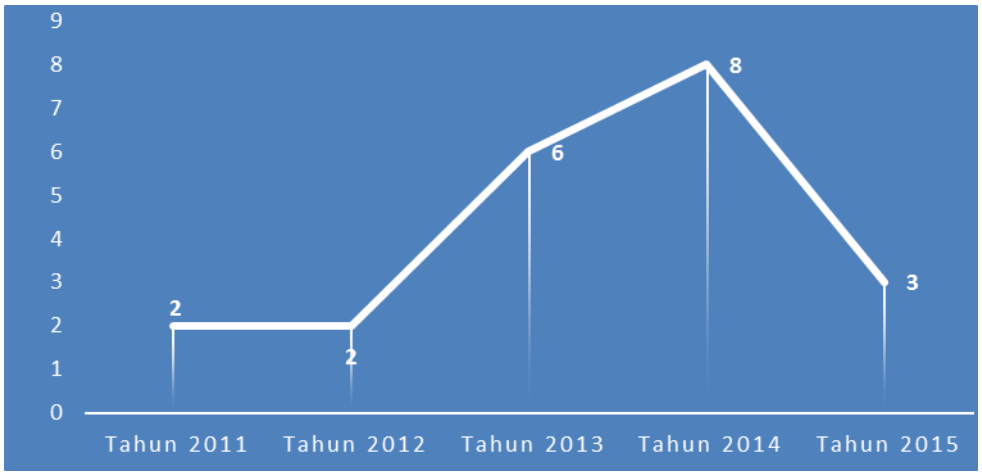

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2015

Kematian bayi hampir terjadi di semua kecamatan, kecuali Kuta Alam. Kematian bayi tertinggi terjadi di Kecamatan Meuraxa dengan 4 kasus.

Grafik 2.7
Jumlah Kematian Bayi di Kota Banda Aceh menurut Kecamatan, 2015

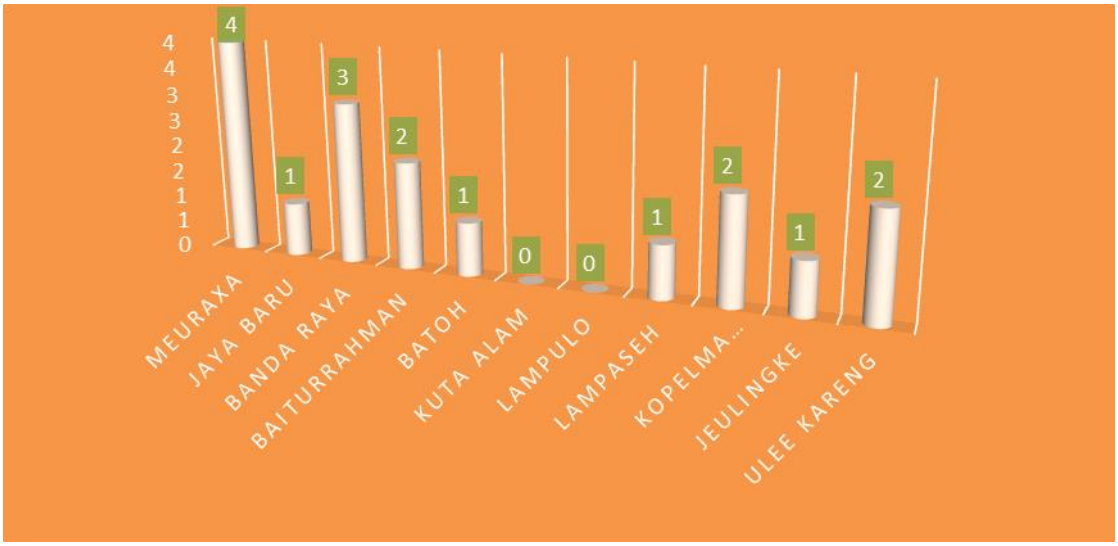

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2015

2.2.3. Angka Kematian Balita (AKBA)

Kematian balita (Akba) adalah jumlah kematian yang terjadi pada anak umur 1 sampai 5 tahun. Angka kematian balita di Kota Banda Aceh Tahun 2015 berjumlah 3 balita. Jumlah kematian balita di Kota Banda Aceh 17 orang, yang tertinggi terjadi di UPTD Puskesmas Meuraxa dan terendah di UPTD Puskesmas Kuta Alam dan Lampulo dimana tidak ada kematian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.8
Jumlah Kematian Balita di Kota Banda Aceh
menurut Kecamatan, 2015

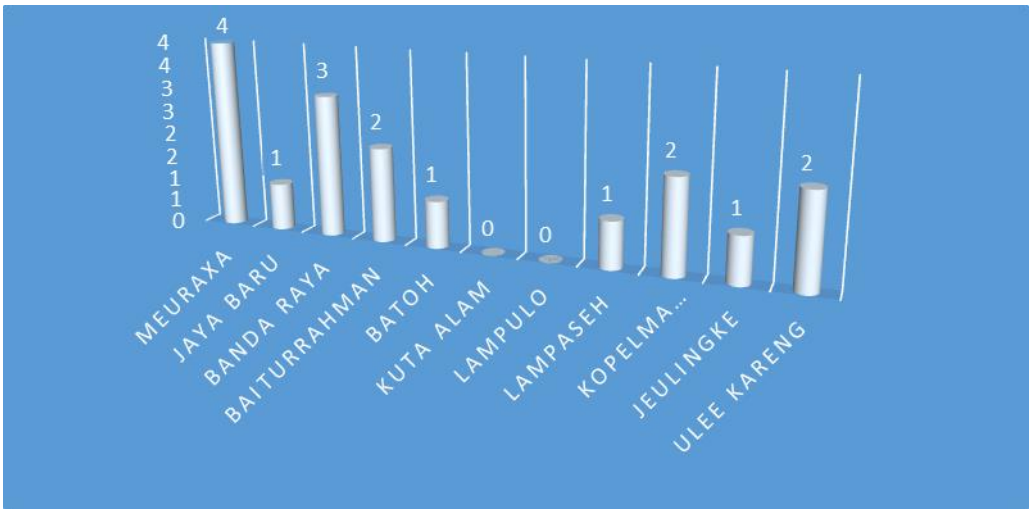

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2015

2.2.4. Proporsi Kelahiran yang ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

Sebagian besar komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Data indikator SPM di kota Banda Aceh pada tahun 2011 - 2015 menunjukkan persentase cakupan persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu dari 89,70% pada tahun 2011 dan terus mengalami peningkatan sampai 96,90% pada tahun 2015.

Pelayanan nifas di kota Banda Aceh juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 88,90% pada tahun 2011 dan meningkat lagi sampai 96,89% pada tahun 2015.

Grafik 2. 9
Perkembangan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Kunjungan Nifas di Kota Banda Aceh, 2011-2015

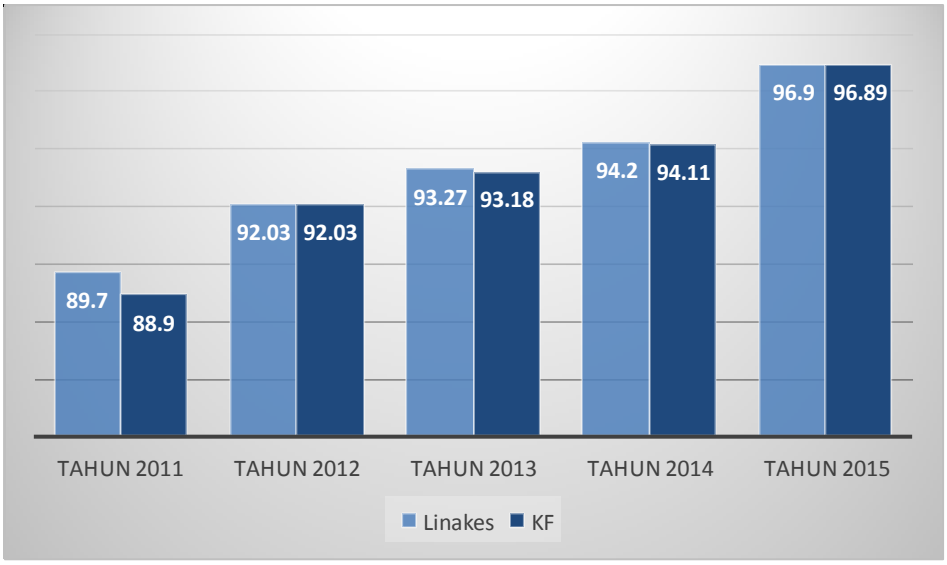

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2015

2.2.5. Jumlah Balita Kurang Gizi (BBLR)

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, bayi dengan Berat Badan Rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. Hasil pantauan selama tahun 2015, terdapat 24 kasus bayi dengan BBLR di Kota Banda Aceh yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 10
Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kota Banda Aceh Tahun 2015

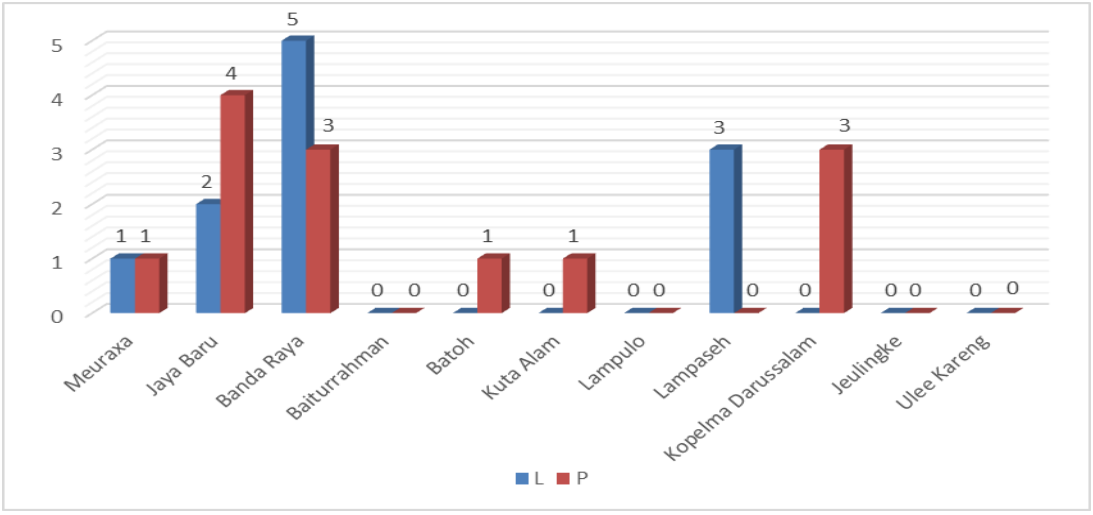

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2015

Gizi buruk masih menjadi penyebab utama kematian anak. Oleh karenanya pemberian ASI ekslusif selama enam bulan pertama dan melanjutkan ASI hingga usia dua tahun sangat penting. Anak yang pendek menurut usia (stunting) tumbuh dan belajar lebih lambat dari anak yang mendapatkan gizi yang lebih baik.

2.3. Bidang Pendidikan

Kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh telah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun, yang merupakan komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita. Bahkan, IPM Kota Banda Aceh terus meningkat menjadi 82,47 jauh melampaui IPM Provinsi Aceh (Tahun 2014 : 68,81) dan Nasional (Tahun 2014 :68,9). Berikut ini adalah IPM Kota Banda Aceh 2011-2014.

Grafik 2. 11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh 2011-2014*

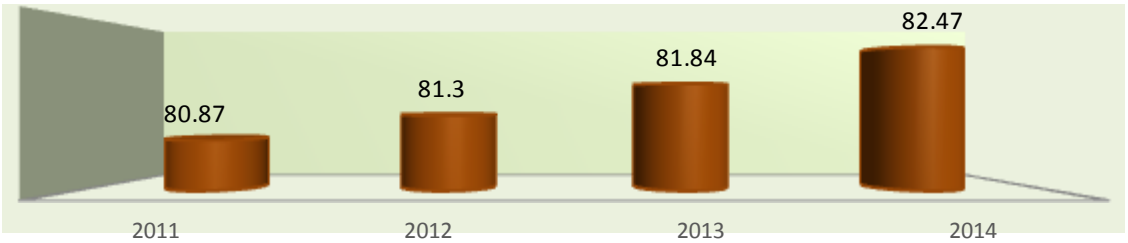

**Angka Sementara, IPM dengan metode perhitungan terbaru*
Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2015

Dari sisi fasilitas, sarana pendidikan di Kota Banda Aceh telah cukup memadai, yakni terdapat sebanyak 225 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 83 sekolah dasar, 31 sekolah menengah pertama, 30 sekolah menengah atas dan 8 sekolah Menengah Kejuruan pada Tahun 2015.

Tabel 2. 3
Fasilitas Kota Banda Aceh

Uraian	2012	2013	2014
Sekolah			
TK	80	85	87
SD/MI	80	83	83
SMP/MTs	30	31	31
SMA/MA	27	29	30
SMK	8	8	8
Murid			
TK	8 206	8 144	7 540
SD/MI	18 648	20 118	21 301
SMP/MTs	9 358	9 437	9 582
SMA/MA	9 460	9 289	8 722
SMK	2 906	2 875	2 820
Guru			
TK	666	728	740
SD/MI	1 319	1 310	1 253
SMP/MTs	926	914	889
SMA/MA	1 023	1 022	1 034
SMK	374	347	413

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2015

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. Pada tahun 2014 Posisi relatif APM SMA/MA Kota Banda Aceh sebesar 58,41% berada di bawah rata-rata APM Nasional (59,35%) dan Provinsi Aceh (69,2%) dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 2. 12
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)Kabupaten

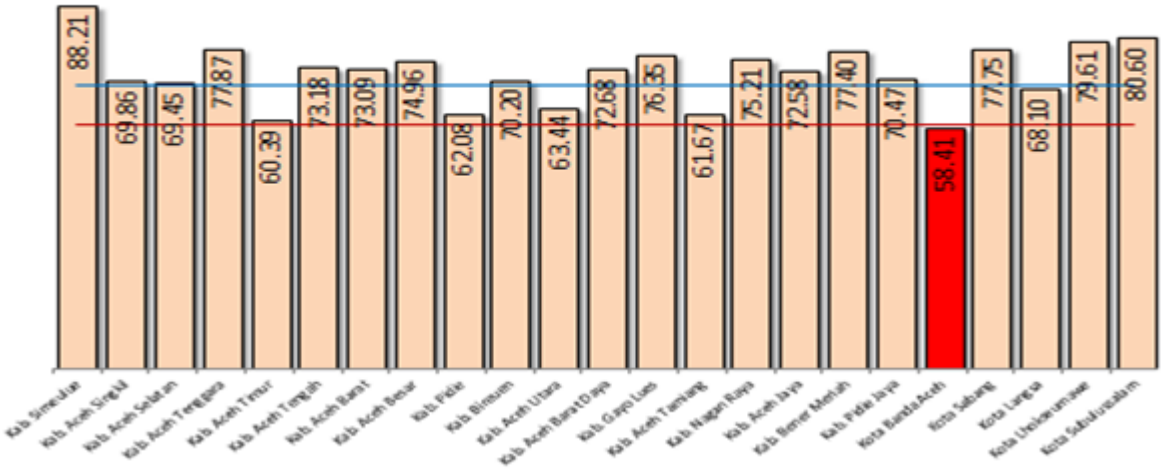

Posisi relatif angka buta huruf penduduk usia 15 thn ke atas di Kota Banda Aceh sebesar 0,70% berada di bawah rata-rata angka buta huruf Nasional (4,88%) dan Provinsi Aceh (2,58%) dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2. 13
Posisi Relatif Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kabupaten di Provinsi Aceh 2014

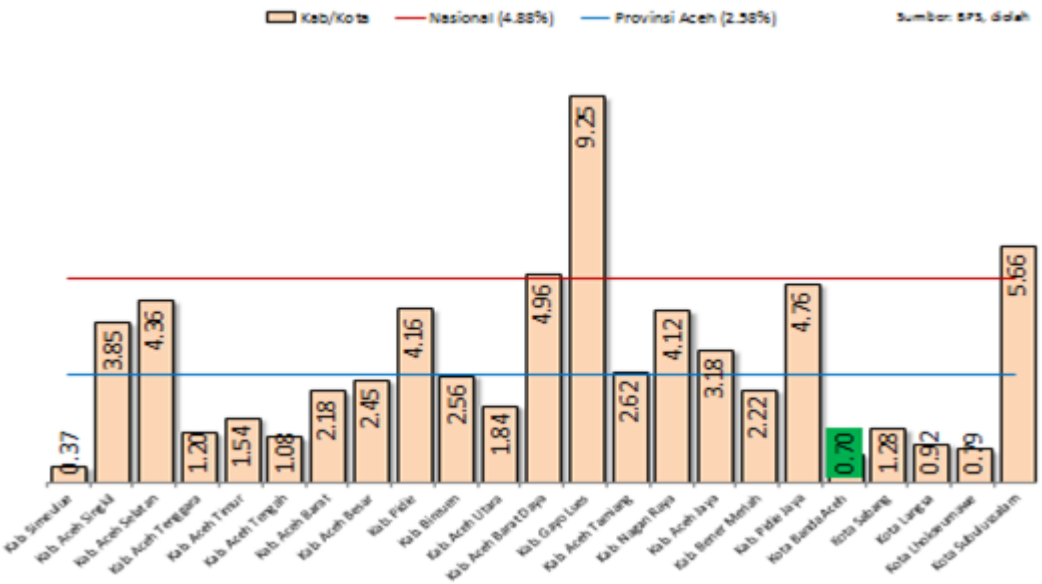

Dalam hal kemudahan jangkauan sekolah atau akses ke sekolah di kotaBanda Aceh pada tahun 2014 merupakan yang terbaik di provinsi Aceh dapat dilihat dari posisi relative jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA di Kota Banda Aceh sejauh 1,42 km berada di bawah rata-rata jarak sekolah Nasional (11,81 km) dan Provinsi Aceh (4,66 km), lihat pada grafik berikut

Grafik 2. 14
Posisi Relatif Jarak Sekolah Menengah atas SMA/MA (km) Kabupaten di Provinsi Aceh

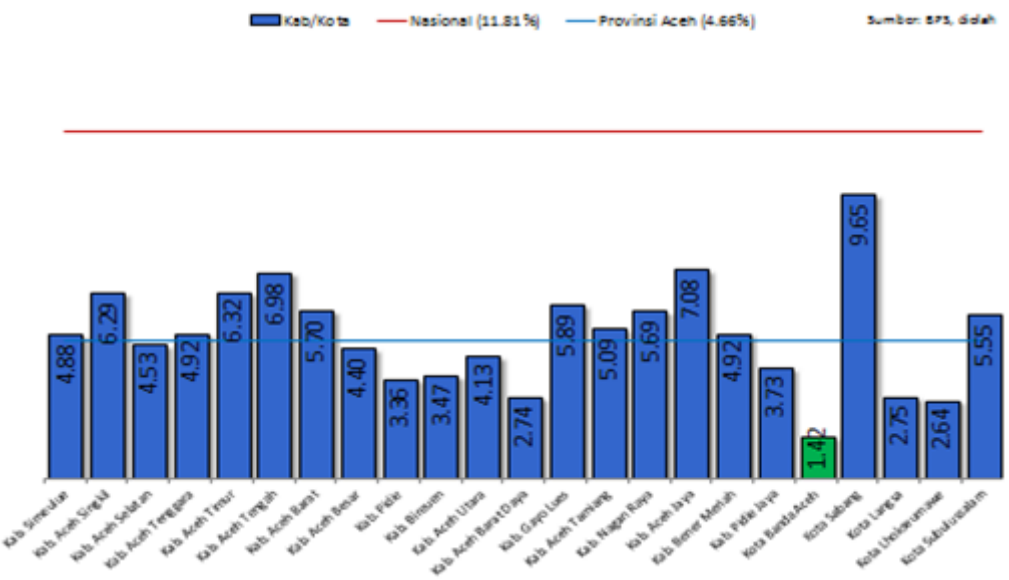

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan terkait penerapan syariat Islam, Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan kebijakan pendidikan diniyah yang merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan agama bagi generasi muda guna memperkuat akidah sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Secara umum seluruh jenjang pendidikan di Kota Banda Aceh telah melaksanakan kurikulum yang berbasis Islam melalui kompetensi inti, yang terdiri dari aspek sikap spiritual (aspek ketuhanan) dan aspek sikap sosial.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui penerapan program diniyah pada sekolah menengah menargetkan peningkatan kemampuan baca Al-quran bagi 97% jumlah siswa sekolah menengah dan direalisasikan pada Tahun 2016 mencapai 100%. Dari total siswa sekolah menengah sebanyak 12.445 siswa, sebanyak 12.070 siswa mampu baca Al-quran secara benar dan baik. Pencapaian target ini didukung melalui adanya persyaratan

masuk sekolah menengah di Kota Banda Aceh yang harus melampirkan sertifikat diniyah bagi siswa dari lingkup sekolah Kota Banda Aceh dan adanya tes baca Alquran bagi siswa dari luar lingkup sekolah Kota Banda Aceh.

Pendidikan diniyah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam baik formal, non-formal maupun informal. Para siswa diajarkan berbagai materi agama Islam meliputi ilmu ketauhidan, Al-quran, budi pekerti, dan pemahaman hukum-hukum Islam (fikih) serta kemampuan untuk baca tulis Arab Jawi. Sepanjang pelaksanaan program diniyah sampai tahun 2016, tercatat dari total siswa sekolah menengah sebanyak 12.445 siswa, yang mampu baca tulis arab jawi secara baik sebanyak 11.822 siswa, atau terealisasi 95% dari target yang ditetapkan (grafik di bawah ini)

Grafik 2.15
Capaian Indikator melalui Kegiatan Pendidikan Diniyah
Kota Banda Aceh Tahun 2013-2015

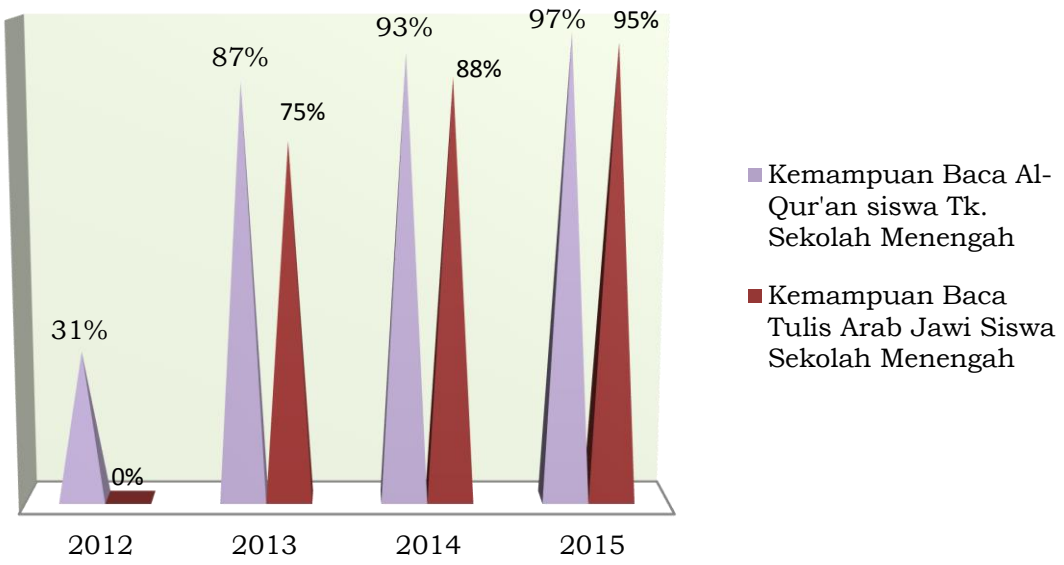

2.4. Bidang Prasarana Dasar

Tabel 2. 4
Indikator Dimensi Prasarana Dasar di Kota Banda Aceh (persen), 2014

No.	INDIKATOR	Capaian Daerah (2014)
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	83,39%
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	84%
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Ases Listrik	100%
4	Proporsi Desa dengan Akses Jalan R Sepanjang Tahun	100%
5	Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik	100%

2.4.1. Akses Air Minum Layak

Distribusi air untuk keperluan air bersih sehari-hari rumah tangga (mandi, cuci, kakus, minum) di Kota Banda Aceh, dilayani oleh PDAM Tirta Daroy sebanyak 83,39 persen pada tahun 2014. Meski demikian, sebagai sumber air minum sehari-hari, sebagian besar penduduk Kota Banda Aceh menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar sebagai bagian dari pola hidup masyarakat perkotaan yang cenderung ingin praktis dalam berbagai hal. Hal ini lebih lanjut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 16
Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kota Banda Aceh (persen), 2009-2014

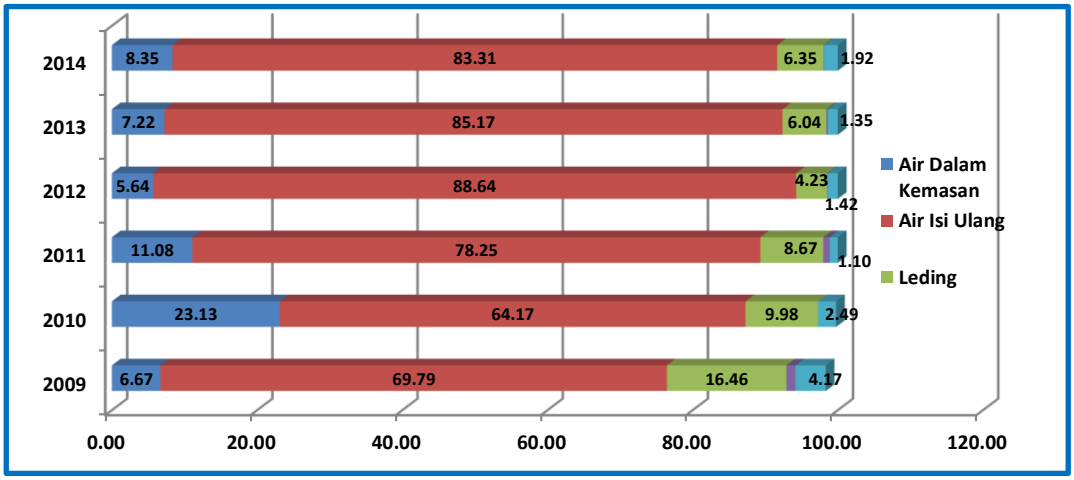

Sumber : Statistik Banda Aceh 2010-2014

2.4.2. Akses Sanitasi Layak

Pada tahun 2014, akses terhadap sanitasi layak yang dimiliki penduduk Kota Banda Aceh sudah melebihi 95 persen walaupun masih terdapat 1,36 persen penduduk yang belum menggunakan fasilitas tempat buang air besar yang benar. Fasilitas tempat buang air besar yang dimiliki secara bersama-sama tampaknya menjadi salah satu pilihan yang harus diambil sebagian warga di kala belum mampu memiliki fasilitas sendiri. Hal ini terlihat dari persentasenya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penjelasan secara grafis dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 17
Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Banda Aceh (persen), 2009-2014

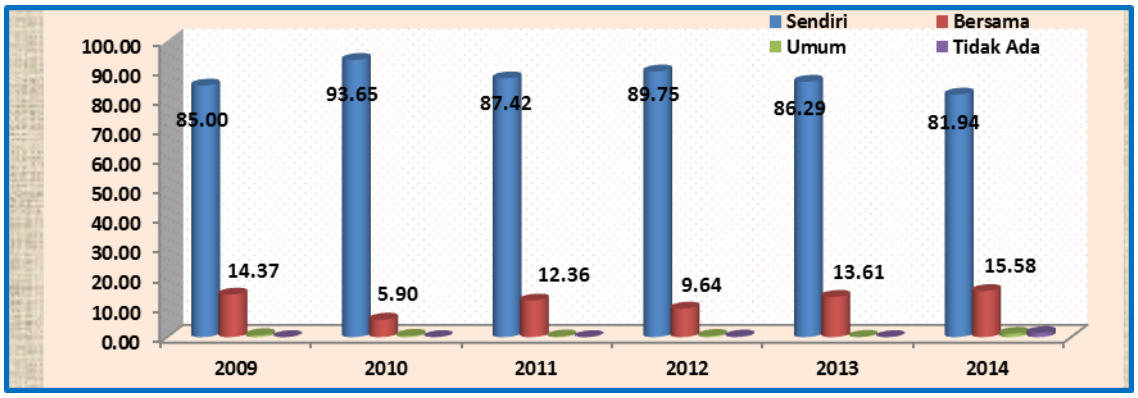

Sumber : Statistik Banda Aceh, 2010-2014

2.4.3. Akses Listrik

Pada tahun 2014 proporsi rumah tangga dengan akses listrik yang berasal dari PT.PLN di kota Banda Aceh telah mencapai 100%. Hal ini dapat di lihat pada grafik di bawah.

Grafik 2. 18
Cakupan Kelistrikan PT.PLN untuk Rumah Tangga di Kota Banda Aceh (persen), 2009-2014

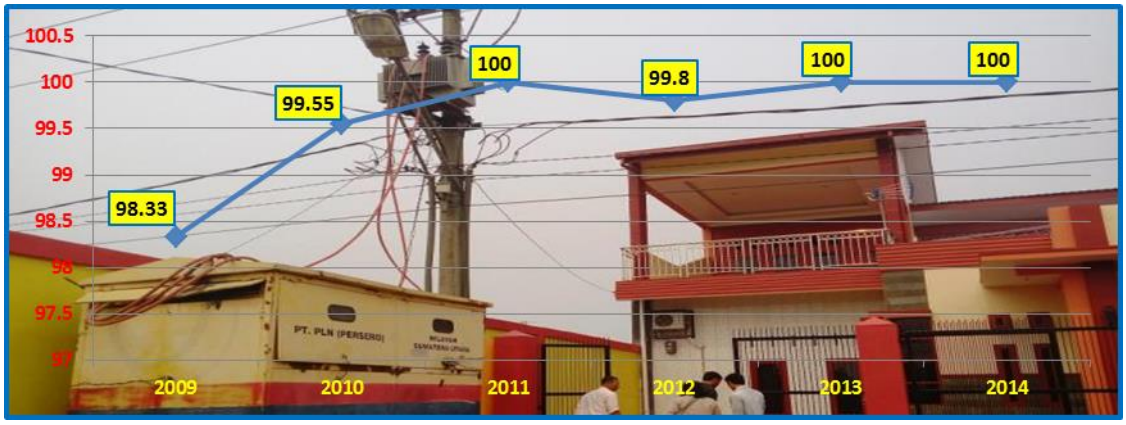

Sumber : Statistik Banda Aceh, 2010-2015

Pada tahun 2014 proporsi rumah tangga dengan akses listrik kota Banda Aceh sebesar 100% berada di atas rata-rata Nasional (97,01%) dan di atas propinsi Aceh (97,55%) seperti pada grafik 2.19 di bawah ini

Grafik 2. 19
Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten di Provinsi Aceh 2014

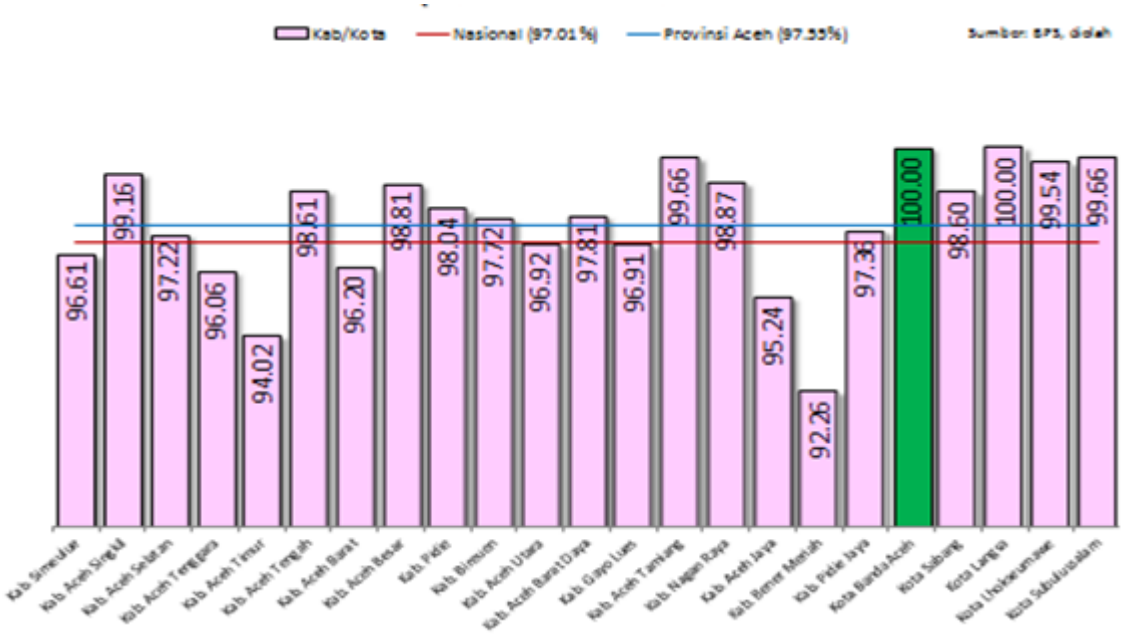

Jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Aceh maka proporsi gampong dengan jaringan listrik di kota Banda Aceh sebesar 100% berada di atas rata-rata Nasional (96,94%) dan di atas propinsi Aceh (99,83%), dapat dilihat pada grafik 2.20

Grafik 2. 20
Posisi Relatif Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Kabupaten di Provinsi Aceh 2014

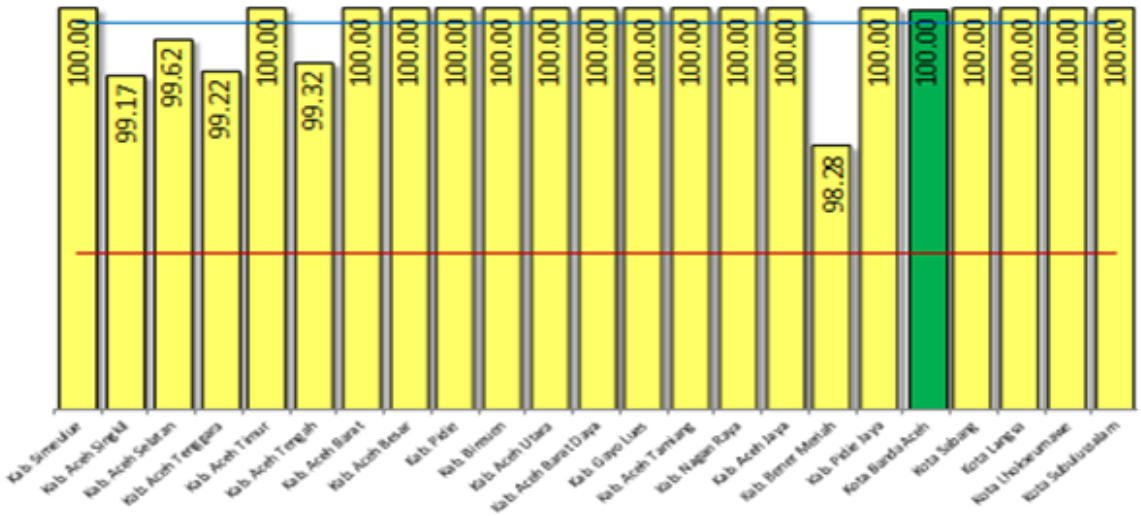

2.5. Bidang Ketahanan Pangan

Sistem perdagangan dunia yang semakin terbuka mempengaruhi harga produk bahan pangan di dalam negeri. Kondisi harga Internasional menimbulkan berbagai masalah terhadap ketersediaan dan distribusi, harga komoditas pangan, terutama pangan strategis seperti beras, daging sapi.

Ketersediaan pangan adalah sejumlah bahan pangan (makanan) yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara/daerah dalam suatu kurun waktu tertentu baik dalam bentuk natural maupun bentuk gizinya. Ketersediaan pangan dihitung dari produksi dalam negeri ditambah cadangan pangan dan import dikurangi ekspor. Berikut ini adalah capaian indicator Bidang Ketahanan Pangan Kota banda Aceh Tahun 2011-2015

Tabel 2. 5
Capaian Indikator Ketahanan Pangan Kota Banda Aceh
Tahun 2011-2015

NO	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perkembangan harga beras	7.686	8.078	8.584	8.867	10.500
2.	Perkembangan harga gula pasir	11.225	12.801	12.873	11.235	13.00
3.	Perkembangan harga minyak goreng	10.588	11.256	10.340	11.098	10.000
4.	Perkembangan harga telur ayam	1.006	1.024	1.223	1.252	1.300
5.	Perkembangan harga daging ayam ras	20.539	21.101	26.103	26.832	22.500

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh dengan luas wilayah yang sangat terbatas, sehingga lahan untuk pertanian sudah tidak tersedia. Semua kebutuhan pangan untuk Kota Banda Aceh dipasok dari daerah lain.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwa harga rata – rata kebutuhan pokok di Kota Banda Aceh terus mengalami kenaikan harga terutama saat puasa dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Naiknya harga beras dan bahan kebutuhan pokok ini sangat dipengaruhi oleh laju inflasi di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan terjadi permintaan barang yang sangat tinggi juga terjadi gagal panen dari daerah-daerah sentra produksi pertanian karena factor bencana alam seperti banjir sehingga berpengaruh terhadap kelancaran distribusi dan pasokan barang pada pasar-pasar induk di Kota Banda Aceh. Peningkatan harga beras dan bahan pokok ini bisa mempersulit situasi penduduk miskin karena semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan untuk konsumsi sehingga mereka makin sulit keluar dari kemiskinan.

2.6. Survey dan Analisa Data Kemiskinan Tahun 2015

Untuk menciptakan strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif, diperlukan analisis profil kemiskinan dan pengangguran yang lebih baik. Analisis lebih dalam memungkinkan karena tersedianya data kemiskinan yang lebih detail dari database kemiskinan yang dikembangkan oleh Unit Pelaksana Tehnis Badan Geographic Information System (UPTB GIS) Bappeda Banda Aceh. Aplikasi E-Walfare (Aplikasi Data Kesejahteraan Yang Terintegrasi Kota Banda Aceh) ini mengkombinasikan data-data kemiskinan dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang selama ini berjalan tidak terintegrasi. Data-data dari database kemiskinan ini dapat dijadikan dasar untuk analisis karakteristik kemiskinan dan pengangguran yang lebih dalam di Kota Banda Aceh. Hasil dari analisis ini dapat dijadikan input untuk menciptakan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Data BDT 2015 dengan jumlah rumah tangga 10% - 40% tingkat kesejahteraan terendah yang ada di Kota Banda Aceh berasal dari TNP2K 2015 yang nantinya akan disinkronkan dengan data TNP2K tahun 2011 dan verifikasi Bappeda tahun 2013. Data tersebut sedang disinkronkan oleh UPTB GIS Bappeda kota Banda Aceh. Berikut data Agregat BDT jumlah Rumah tangga kondisi kesejahteraan dari 10%-40% dalam Kota Banda Aceh Tahun 2015 Per Kecamatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Data Agregat BDT RTS
dengan Kondisi Tingkat Kesejahteraan dari 10%-40% Terendah
Kota Banda Aceh Tahun 2015 Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
MEURAXA	85	284	210	251	830
JAYA BARU	86	302	192	218	798
BANDA RAYA	116	304	208	174	802
BAITURRAHMAN	186	369	268	247	1,070
LUENG BATA	138	262	168	173	741
KUTA ALAM	127	390	282	286	1,085
KUTA RAJA	122	248	221	200	791
SYIAH KUALA	139	454	272	248	1,113
ULEE KARENG	218	475	266	230	1,189
TOTAL	**1,217**	**3,088**	**2,087**	**2,027**	**8,419**

Sumber : Basis data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015)

Catatan :

Desil 1 (Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai 10% terendah di Indonesia)

Desil 2 (Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai 11% - 20% terendah di Indonesia)

Desil 3 (Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai 21% - 30% terendah di Indonesia)

Desil 4 (Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai 31% - 40% terendah di Indonesia)

Dari analisis berdasarkan database kesejahteraan dari 10%-40% berdasarkan Agregat BDT Tahun 2015, didapatkan berbagai fakta menarik, bahwa jumlah rumah tangga dengan kesejahteraan dan rentan miskin tertinggi dalam Kota Banda Aceh terdapat dalam kecamatan Ulee Kareng yaitu 1,189 rumah tangga sedangkan pada Kecamatan Lueng Bata hanya 741 RTS. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di kecamatan Lueng Bata sudah banyak yang bekerja. Berikut data Agregat BDT 2015 berdasarkan lapangan pekerjaan dan pendidikan, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2. 21
Jumlah rumah tangga menurut lapangan pekerjaan dengan Kondisi Tingkat Kesejahteraan dari 10%-40% Terendah di Kota Banda Aceh Tahun 2015

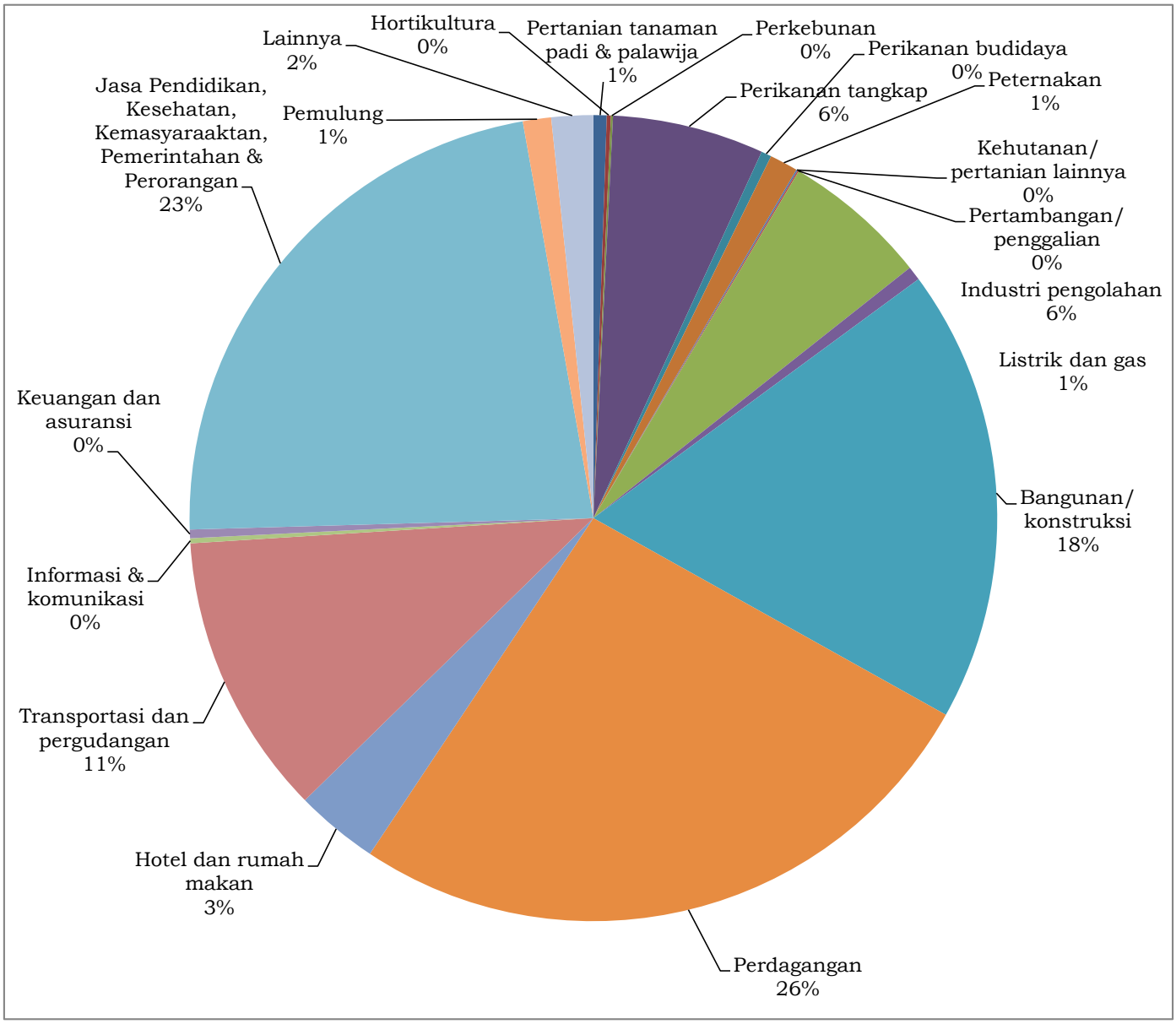

Sumber: Hasil Analisis 2015

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa lapangan pekerjaan yang sangat dominan di Kota Banda Aceh didominasi oleh sektor perdagangan yang mencapai 26%. Kemudian diikuti pada bidang Jasa Pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan sebesar 23% dan transportasi dan pergudangan 11%.

Pengangguran bukanlah penyebab utama kemiskinan di Kota Banda Aceh. Penyebab kemiskinan utama adalah rendahnya gaji/ pendapatan

yang didapatkan penduduk miskin dari pekerjaan di tiga sektor tersebut. Fakta ini bisa dijadikan salah satu *main input* bagi strategi penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh.

Tabel 2.7
Penduduk Berdasarkan Pendidikan
dengan Kondisi Tingkat Kesejahteraan dari 10%-40% Terendah
di Kota Banda Aceh Tahun 2015

Umur	Bersekolah (orang)	Tidak bersekolah (orang)	Jumlah Bersekolah dan Tidak Bersekolah
7-12	5.042	97	5.139
13-15	1.945	88	2.033
16-18	1.160	557	1.717
Total	**8.147**	**742**	**8.889**

Sumber: Data BDT tahun 2015 (TNP2K 2015)

Tingkat pendidikan penduduk dengan kesejahterjaan terendah 10%-40% di atas dapat dijadikan dasar untuk memetakan hubungan antara sektor yang banyak menyerap penduduk rentan miskin dan tingkat pendidikannya.

Berdasarkan data BDT (Basis Data Terpadu) Tahun 2015 dari database kemiskinan TNP2K Tahun 2015 menjelaskan bahwa kemiskinan sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan. Dari tabel diatas menjelaskan bahwa dari 8.889 orang wajib sekolah dan tidak bersekolah usia (7-18 tahun) ternyata anak yang bersekolah dalam kota Banda Aceh untuk tingkat umur 7-12 Tahun menduduki peringkat tertinggi sebesar 57 % (5.042 orang).

BAB III. RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
5. Mensinergikan kegiatan anggaran program sektor dan daerah yang diarahkan langsung kepada kelompok masyarakat miskin
6. Meningkatkan kapasitas pemerintah Kecamatan dan Gampong/Desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan forum publik lainnya
7. Mengembangkan forum publik untuk monitoring dan evaluasi (monev) dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Dalam rangka percepatan penanggulangan permasalahan kemiskinan, pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berapa kebijakan, di antaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan akurasi database angka kemiskinan dengan menggunakan 14 (empat belas) indikator, yang merupakan gabungan antara indikator nasional dan indikator lokal dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Meningkatkan kualitas kebijakan dan program serta kegiatan yang *pro poor* dan *pro job*.
3. Mengkoordinasi perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
4. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi serta memfasilitasi lintas pelaku serta menyebarluaskan informasi penanggulangan kemiskinan di lembaga atau dinas/instansi terkait.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penaggulangan kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Kota Banda Aceh mengikuti klasifikasi program penanggulangan kemiskinan nasional yang diklasifikasikan dalam beberapa klaster program sebagai berikut:

1. Klaster 1 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah individu atau keluarga. Program penanggulangan kemiskinan klaster 1 ini disebut juga sebagai program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (*Family Centered Integrated SocialAssistance*). Bantuan sosial berbasis keluarga mencakup:
   a. Bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Bantuan langsung dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan (PKH) –*Conditional Cash Transfer*), Bantuan langsung tunai tanpa syarat (*UnconditionalCash Transfer*), Bantuan langsung dalam bentuk inkind (Beras miskin (Raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya.
   b. Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini.
   c. Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (*parenting education*) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
2. Klaster 2 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah masyarakat atau komunitas. Program penanggulangan kemiskinan klaster 2 ini juga disebut sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari program klaster 2 adalah untuk meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat agar dapat memaksimalkan fungsinya dalam masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Klaster 3 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil. Program penanggulangan kemiskinan klaster 3 ini juga disebut sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.
4. Klaster 4 adalah program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis pada upaya peningkatan dan perluasan program pro rakyat. Kelompok program ini

adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan askes terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program- program dalam kelompok ini adalah program kemiskinan lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Tabel 3. 1
Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)					SKPD
		APBK	APBK/ZIS	APBA	APBN	CSR	
	KLUSTER I						
1	Beasiswa Miskin	1.170.000.000					
	- Bantuan beasiswa kurang mampu tingkat SD						Disdikpora koordinasi dengan DPKAD
	- Bantuan beasiswa kurang mampu tingkat SMP						
	- Bantuan beasiswa kurang mampu tingkat SMA						
2	BOS Pusat untuk SD				17.506.400.000		Disdikpora
	BOS Pusat untuk SMP				9.416.000.000		Disdikpora
	BOS Pusat untuk SMAK				17.913.000.000		Disdikpora
3	Beasiswa Miskin		3,505,500,000				Baitul Mal
	- MUQ: 14 org. @ Rp 850.000,-		127.500.000				
	- Setengah penuh: 400 org.@ Rp 300.000,-		1.260.000.000				
	a. SD: 1.600 org x Rp 400.000		640.000.000				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)					SKPD
		APBK	APBK/ZIS	APBA	APBN	CSR	
	b. SMP: 1.000 org x Rp 500.000,-		500.000.000				
	c. SMA: 900 org x Rp 600.000,-		540.000.000				
	d. Santri pesantren Salafi: 93 org.@ Rp 500.000,-		438.000.000				
4	Sosialisasi pendataan masyarakat untuk mempunyai kartu jaminan kesehatan					37.175.000	Dinkes
5	Raskin				1.774.080.000		Bag.Ekonomi
6	Bantuan Sosial	1.340.000.000				434.500.000	DPKAD
	Disabilitas/direncanakan	480.000.000				427.500.000	DPKAD
	Bantuan yang tidak direncanakan	860.000.000				7.000.000	DPKAD
7	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)		4,160,000,000				Baitul Mal
8	Program Keluarga Harapan (PKH)	111.377.300			5.835.430,000		Dinsosnaker
	Jumlah	**3,961,377,300**	**7.665.500.000**		**52.444.910.000**	**471.675.000**	
	TOTAL KLASTER 1	***63,203,462,300***					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)					SKPD
		APBK	APBK/ZIS	APBA	APBN	CSR	
	KLASTER II						
1	ADG	38.407.220.440					BPM
2	Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	2.800.000.000					BPM
3	Dana Desa				55.864.119.000		BPM
	Jumlah	**41.207.220.440**			**55.864.119.000**		
	TOTAL KLASTER II	***97.071.339.400***					
	KLASTER III						
1	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)	**3,000,000,000**					BPM
2	Pelatihan dan Pendampingan bagi Kelompok UPPKS				90.000.000		PP & KB
3	Kelompok Prima Madanii				352.000.000		PP & KB
4	Bantuan Modal Usaha Kecil		800.000.000				Baitul Mal
5	Pelatihan Ketrampilan		330.400.000				Baitul Mal
6	Program Pengembangan dan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	**3.848.103.200**					Disperindagkop
	- Pelatihan kewirausahaan	0					Disperindagkop

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)					SKPD
		APBK	APBK/ZIS	APBA	APBN	CSR	
	- Bantuan Modal berupa barang kepada UKM	3.786.920.000					
	- Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	61.183.200					Disperindagkop
7	Program pengembangan industri kecil dan menengah	**3.549.065.500**					Disperindagkop
	- Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemamfaatan sumber daya	44.365.500					Disperindagkop
	- Bantuan Modal berupa barang kepada IKM	3.113.500.000					Disperindagkop
	- Pembinaan industri kecil dan menenganh dalam memperkuat jaringan claster industri	0					Disperindagkop
	- Promosi hasil industri	391.200.000					Disperindagkop
8	Program peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan	**335.100.000**					DKPP
	- Pengadaan benih tanaman,bibit jahe,cabe,tomat, selada,sawi,terong,jagung dan bayam. kangkung	32.150.000					DKPP

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)					SKPD
		APBK	APBK/ZIS	APBA	APBN	CSR	
	- Pengadaan keranjang bamboo, pot plastik	22.200.000					DKPP
	- Pengadaan polybag	2.064.000					DKPP
	- Pengadaan pupuk NPK	630.000					DKPP
	- Pupuk Kandang dan Kompos	42.556.000					DKPP
	- Pengadaan bibit pohon Mangga di Keamatan Jaya Baru dan Banda Raya	72.000.000					DKPP
	- Pengadaan benih padi kecamatan Ulee Kareng, Syiah Kuala , Lueng Bata, Banda Raya	28.500.000					DKPP
	- Pengadaan alat dan bahan pertanian untuk kelompok tani Gp. Lhong Raya, Punge Blang Cut, Ilie, Cot Langkeuweuh	135,000,000					DKPP
9	Program Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK)	**580.000.000**					DKPP
	- 'Pengadaan Freezer, Cool Box, Ice Cruiser	380,000,000					DKPP
	- Pembangunan balai pertemuan nelayan kec.meuraxa	0					DKPP
	- Pembangunan	200,000,000					DKPP

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)					SKPD
		APBK	APBK/ZIS	APBA	APBN	CSR	
	dermaga tambat boat kec.meuraxa						
10	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	**832.500.000**					DKPP
	- Pengadaan Sumur Bor Kec.Banda Raya, kec. Ulee Kareng, kec. Syiah Kuala	540,000,000					DKPP
	- Pembangunan lantai jemur gp.ceurih,Ilie, Mibo	292,500,000					DKPP
11	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	**1.689.500.000**					DKPP
	- Pengadaan sapi	190,000,000					DKPP
	- Pengadaan Ternak Bebek	35,000,000					DKPP
	- Pengadaan Ternak Kambing	217,000,000					DKPP
	- Pengadaan Ternak Kambing PE,	310,000,000					DKPP
	- Pengadaan Penetas Telur Dan peralatannya, Kelompok Bersama, Gp. Lampulo, Kec. Kuta Alam	30,000,000					DKPP
	- Pengadaan Sapi Lokal jantan dan betina	400,000,000					DKPP

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)					SKPD
		APBK	APBK/ZIS	APBA	APBN	CSR	
	- Pengadaan sapi penggemukan, sapi Jantan Penggemukan dan sapi jantan lokal penggemukan	448,500,000					DKPP
	- Pengadaan Domba Untuk Kelompok Ternak Seujahtera, Gp Deah Raya	24.000.000					DKPP
	- Pengadaan Kambing Penggemukan Untuk Kelompok Blang Bereundeng, Gp. Ateuk Jawo, Kec. Baiturrahman	35,000,000					DKPP
12	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	**2.525.547.300**					DKPP
	- Pengadaan Bibit Ikan Kue untuk Kelompok Suah Tabina Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala	24.999.800					DKPP
	- 'Pengadaan Bibit Udang Lobster untuk Kelompok Cahaya Bahari Gampong Ulele Kecamatan Meuraxa	24.932.000					DKPP
	- Pengadaan Bibit Ikan Bandeng	52,087,500					DKPP
	- Pengadaan Pakan Ikan	358,422,000					DKPP

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)					SKPD
		APBK	APBK/ZIS	APBA	APBN	CSR	
	Bandeng, pakan ikan lele dan pakan ikan lele dumbo						
	- Pengadaan Keramba Jaring Apung	97.000.000					DKPP
	- Pengadaan Bibit Ikan Lele dan bibit ikan lele Dumbo	520,401,000					DKPP
	- Rehab Tambak untuk Kelompok Makmu Bersama Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam	40,000,000					DKPP
	- Pengadaan Jaring Insang	48,000,000					DKPP
	- Bantuan Sarana Produksi Kepada Pembudidaya Ikan Kelompok Babah Alue Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala	25,000,000					DKPP
	- Pengadaan Bibit Udang	38,774,000					DKPP
	- Pengadaan Pakan Udang	81,186,000					DKPP
	- Pengadaan Armada Penangkapan Ikan	415,000,000					DKPP
	- Pengadaan CoolBox,	247,500,000					DKPP

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)					SKPD
		APBK	APBK/ZIS	APBA	APBN	CSR	
	pengadaan freezer dan pengadaan genset						
	- Pengadaan Rumpon untuk Kelompok Nelayan Tuna dan kelompok Kakap Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam	200,000,000					DKPP
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan untuk Kelompok Usaha Tambak Udang	140,000,000					DKPP
	- Pengadaan Kincir Air dan pintu air tambak	75,000,000					DKPP
	- Pengadaan Komputer untuk Kelompok Hukum Adat Laut Kuala Cangkoi Gampong Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa	15,000,000					DKPP
	- Pengadaan Mesin Boat, pengadaan boat dan rehap boat	170,000,000					DKPP
	- Pembuatan Kolam Ikan untuk Kelompok Bijeh Jeut Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata	100,000,000					DKPP
	- Pengadaan Mesin Pompa Air untuk Kelompok Usaha Tambak Gampong Alue Naga Kecamatan	15,000,000					DKPP

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)					SKPD
		APBK	APBK/ZIS	APBA	APBN	CSR	
	Syiah Kuala						
	- Pengadaan Jala Ikan untuk Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng	30,000,000					DKPP
	- Pengadaan Bibit Kepiting untuk Kelompok "Endot Soka" Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa	29,995,000					
	Jumlah	**16.359.816.000**	**1.130.400.000**		**442.000.000**		
	TOTAL KLASTER III	***18.154.966.900***					
	KLASTER IV						
1	Program Pegembangan Perumahan	**90.000.000**		**3.000.000.000**			PU
	- Pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat sederhana			3.000.000.000			PU
	- Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Banda Aceh Gp.Ceurih Kec. Ulee Kareng	90.000.000					PU
2	Rumah Dhuafa		**3.615.000.000**				
	- Pembangunan rumah Dhuafa		2.805.000.000				Baitul Mal
	- Renovasi Rumah Dhuafa		810.000.000				Baitul Mal
3	Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	**370.714.500**					Dinsosnaker

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2016 (Rp)					SKPD
		APBK	APBK/ZIS	APBA	APBN	CSR	
	- Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	47.222.000					Dinsosnaker
	- Pengadaan sarana dan prasrana pendukung usaha bagi keluarga miskin	323.492.500					Dinsosnaker
4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**425.356.100**					Dinsosnaker
	- Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	425.356.100					Dinsosnaker
	Jumlah	**886.070.600**	**3.615.000.000**	**3.000.000.000**			
	TOTAL KLASTER IV	***7.501.070.600***					

Tabel 3. 2

Sumber Dana Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Per Klaster Tahun 2016

KLASTER	SUMBER DANA (Rp)			
	APBK	APBA	APBN	CSR
Klaster I	10,286,877,300	0	52,444,910,000	471,675,000
Klaster II	41,207,220,440	0	55,864,119,000	0
Klaster III	17,712,966,900	0	442,000,000	0
Klaster IV	4,501,070,600	3,000,000,000	0	0
TOTAL	**73,708,135,240**	**3,000,000,000**	**108,751,029,000**	**471,675,000**

Grafik 3. 1
Persentase Sumber Dana Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2016

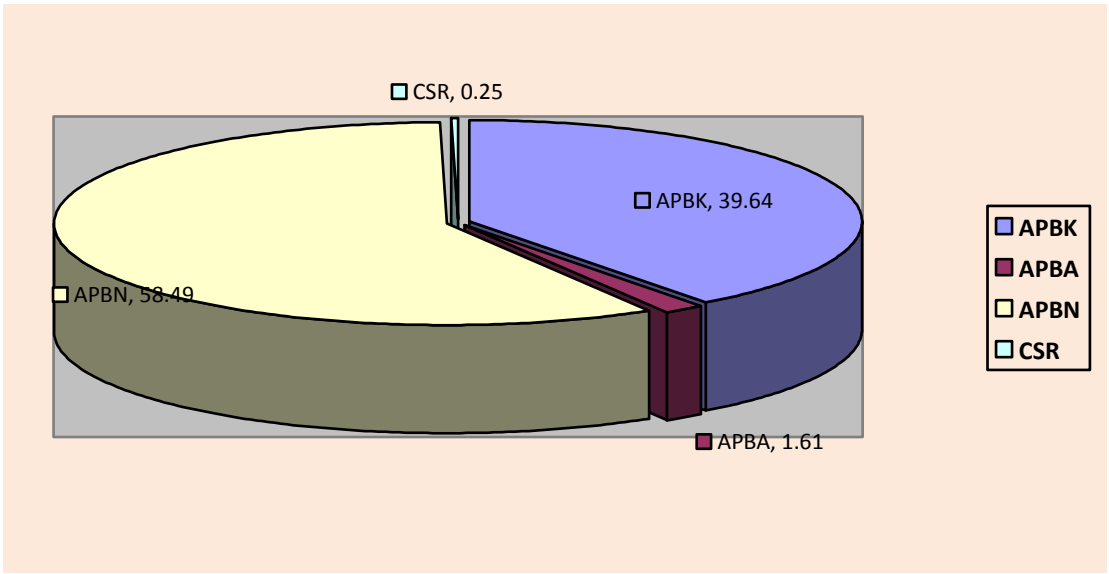

BAB IV. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Koordinasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh sangat penting dilakukan, yaitu dengan memahami terhadap latar belakang, tujuan dan sasaran program agar TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan sinergi dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.

TKPK Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh diharapkan dapat melakukan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali pada tahun 2016. Adapun ruang lingkup koordinasi dalam pendekatan kelembagaan adalah sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan (Pasal 6 Permendagri No. 42 Tahun 2010). Bentuk koordinasi dapat melakukan FGD (Focused Group Discussion) dan melibatkan unsur masyarakat (swasta; warga miskin yang tidak lagi miskin; representase dari Rumah Tangga Miskin; tokoh agama dan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat)

BAB V. PENUTUP

Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Dokumen Laporan Kinerja TKPK Tahun 2016 ini memuat berbagai capaian dan strategi yang akan dilakukan.

Secara umum, hasil analisa menunjukkan bahwa kota Banda Aceh memiliki profil yang cukup baik jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar. Melalui analisa kondisi kemiskinan Kota Banda Aceh juga ditemukan bahwa penyebab utama kemiskinan di Kota Banda Aceh bukan hanya tingkat pengangguran yang tinggi, namun pendapatan penduduk (income) yang rendah.

Untuk itu, diperlukan intervensi khusus kepada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja miskin, memiliki strategi yang baik agar telah direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, khususnya masyarakat di Kota Banda Aceh.